



PENGARUH PROGRAM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) DAN MUSYAWARAH KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKKS) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Agus Santoso

MTs. Al-Mabsyar Nurul Iman, Tenggarong

Email: Santoso.agus45@yahoo.co.id

Andi Achmad

Pascasarjana LAIN Samarinda, Samarinda

Email: aachmad91@yahoo.com

Muhammad IbnuSyam Wardana

MTs. Al-Mabsyar Nurul Iman, Tenggarong

Email: ibnu.muhammadibnusyamwardana@gmail.com

Abstract:

Apathy about teacher performance in schools is one reality. The fact of the tendency of doubt about the performance of the teacher could have been caused by the absence of the development of knowledge and skills related to the four teacher competencies. On the other hand, there is still a problem regarding the lack of systematic management of school performance programs that are not managed systematically and are not in accordance with the education calendar that has been formulated and established so that in daily implementation the school is always changing, disrupting the learning process that has been determined. To overcome these obstacles a place for teachers and principals is needed that aims to gather various new information and experiences in the industrial era 4.0. The purpose of this study was to determine the effect of the Subject Teachers' Consultation and School Principal Working Groups simultaneously on Improving Teacher Performance in Kutai Kartanegara District. This type of research is a field research with a quantitative approach. Data collection techniques in this study used a questionnaire and documentation. Data validity test uses validity test, normality test and classic assumption test. Data analysis techniques using multiple linear regression test. Based on the results of the study note that there is no simultaneous effect between the Subject Teachers' Deliberation Program and the Principal Working Group Conference on Improving Teacher Performance in Kutai Kartanegara District. The absence of this influence is due to the the Subject Teachers' Deliberation Program and School Principal Working Groups in Kutai Kartanegara Regency which are

considered not working properly according to the planned program. Whereas on the other hand it is considered a lack of support from stakeholders in the area, in this case the government which oversees the Subject Teachers' Deliberation Program and School Principal Working Groups. So based on data between the Subject Teachers' Deliberation Program and School Principal Working Groups, they have not synergized well.

Keyword: the Subject Teachers' Deliberation Program, School Principal Working Groups, Improving Teacher Performance.

Abstrak

Apatis terhadap kinerja guru di sekolah adalah salah satu kenyataan. Fakta dari kecenderungan keraguan terhadap kinerja guru ini bisa saja disebabkan dengan tidak adanya pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan empat kompetensi guru. Di sisi lain masih dijumpai tentang persoalan minimnya manajemen program kinerja kepala sekolah yang tidak termanage secara tersistem serta tidak berkesesuaian dengan kalender pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sehingga di dalam pelaksanaan harian di sekolah selalu berubah-ubah maka mengganggu proses jalannya pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukanlah suatu tempat untuk guru dan kepala sekolah yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan pengalaman baru di era industri 4.0. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah secara simultan terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/questioner dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan uji validitas, uji normalitas dan uji asumsi klasik. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terjadinya ketiadaan pengaruh tersebut dikarenakan MGMP dan MKKS di Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program yang telah direncanakan. Sedangkan di sisi lain dianggap kurangnya dukungan dari stakeholder di daerah tersebut, dalam hal ini yaitu pemerintah yang menaungi MGMP dan MKKS tersebut. Sehingga berdasarkan data antara MGMP dan MKKS belum bersinergi dengan baik.

Kata kunci: program musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kelompok kerja kepala sekolah, peningkatan kinerja guru

A. Pendahuluan

Apatis terhadap kinerja guru di sekolah/madrasah merupakan salah satu kenyataan. Keraguan terhadap kinerja guru ini sering dipertanyakan oleh pihak pengawas, kepala sekolah bahkan orang tua siswa terkait ketidakpuasan hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa dilihat dari menurunnya nilai ulangan harian, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester bahkan ditemukan rendahnya nilai Ujian Nasional siswa bahkan terjadinya kecurangan pada saat ujian.¹ Terkait fakta dari kecenderungan rendahnya kinerja guru ini bisa saja disebabkan tidak adanya pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri guru di sekolah untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangannya sebagai seorang guru terkait dengan empat kompetensi guru. Di sisi lain masih dijumpai tentang persoalan minimnya manajemen program kinerja kepala sekolah yang tidak *termanage* secara tersistem serta tidak berkesesuaian dengan kalender pendidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sehingga di dalam pelaksanaan harian selalu berubah-ubah, maka dalam hal ini mengganggu proses jalannya pembelajaran yang telah ditetapkan.²

Dalam konteks lain tidak kalah rumitnya apabila suatu sekolah atau pondok pesantren di bawah naungan Yayasan, maka tentunya hal ini yayasan harus betul-betul memiliki manajemen yang tersistem sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang sehingga tidak membingungkan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi apabila lembaga tersebut terdiri lebih dari dua badan usaha, maka harus adanya sinkronisasi yang jelas antara kinerja guru dengan kinerja kepala sekolah serta kebijakan Yayasan seirama dan tersistem dalam mengambil keputusan, tujuannya agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya selalu berkaitan dengan visi dan misi Yayasan sehingga dapat saling besinergi dengan visi misi sekolah maupun kepondokan. *Statement* ini berkesesuaian sebagaimana pernyataan E. Mulyasa yang dikutip oleh Fathul Jannah yang menyatakan bahwa: manajemen juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.³ Namun, di dalam jurnal ilmiah ini hanya dititik fokuskan kepada dua variabel yakni kinerja guru dan program kinerja kepala sekolah, fungsinya agar pemmasalahan yang diteliti tidak melebar.

Kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang mengatur jalannya proses kegiatan di sekolah, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran supaya lancar jalannya. Namun, faktanya bahwa kepala sekolah disebagian sekolah

¹ Agus Santoso dan Muhammad Nasir, *Pengaruh Discovery dan ekspository Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri Kota Samarinda*, (Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4 No. 2), h. 16.

² Agus Santoso dan Andi Achmad, *Desain Revisi Penilaian Kurikulum 2013 Tahun 2017: Studi pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Syamil: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6 No. 1), h. 110.

³ Fathul Jannah, *Manajemen Akademik: Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), h. 53.

dianggap hanya sekedar bekerja untuk memenuhi kewajiban tugas semata tidak sebagai suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga kepala sekolah hanyalah suatu jabatan semata yang belum terbangun sebagai suatu kesadaran dan kebutuhan dalam rangka pengembangan sekolah yang unggul dalam mewujudkan 9 standar pendidikan yakni standar persuratan serta pengarsipan.

Kecenderungan-kecenderungan dari timbulnya berbagai persoalan yang terjadi di sekolah diakibatkan dari ketidakjelasan antara program kinerja kepala sekolah dan guru di sekolah terkait tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga menyebabkan banyak permasalahan yang timbul sehingga berdampak kepada peserta didik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, terkait konteks guru dan kepala sekolah di atas, maka diperlukanlah suatu wadah atau tempat sebagai alat perkumpulan dalam ranah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan pengalaman melalui kajian pemahaman sehingga memunculkan suatu ide atau gagasan baru dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama terutama di era industri 4.0. Salah satu tempat perkumpulan untuk guru dinamakan sebagai musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat dengan (MGMP). MGMP adalah forum kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran pada tingkat SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada satu kabupaten yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi perubahan dalam kegiatan proses pembelajaran.⁴

Sedangkan perkumpulan kepala sekolah dinamakan sebagai musyawarah kelompok kerja kepala sekolah yang disingkat sebagai (MKKS). Perkumpulan MKKS adalah suatu forum profesional kepala sekolah ditingkat kabupaten untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat bekerja secara profesional dengan tidak mengutamakan pencitraan demi kepentingan personal dan golongan sehingga meniadakan komunikasi, aturan dan kebersamaan. Sedangkan tujuan dari MKKS adalah sebagai upaya dalam pemberdayaan peningkatan kemampuan kepala sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah dirumuskan, dirancang, dibuat dan harus dilaksanakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yakni era industri 4.0.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kota Tenggara Kabupaten Kutai Menurut Kadisdik Kukar Wiyono menyatakan bahwa:

“dari sekitar 11.852 guru, sebanyak 2.492 orang dinyatakan belum layak. Sementara 9.360 orang lainnya masuk kategori layak. Untuk guru yang tak layak tersebut, biasanya mendapat nilai uji kompetensi guru (UKG) di bawah standar. Selain itu, bisa karena belum menempuh jenjang pendidikan minimal S-1 yang linear dengan pelajaran yang diajarkan. Sementara itu,

⁴ Direktorat Profesi Pendidik, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008), h. 17.

untuk tingkat SMP, guru yang layak sebanyak 2.415 orang dan yang tidak layak mencapai 449 orang. Untuk pembinaan kualitas dan daya asah mengajar guru, Disdik Kukar sudah mengaktifkan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) di setiap gugus sekolah. Masing-masing regional di tingkat kecamatan, kata dia, wajib membuat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dari kegiatan ini, baik pihak guru dan kepala sekolah akan paham dengan penyelenggaraan belajar-mengajar yang sesuai dengan standar yang mana dulunya kegiatan ini tidak jalan. Makanya kita sayangkan sekali. Saat ini banyak nilai UKG guru yang masih di bawah standar”.

Disandarkan konteks pernyataan di atas, terindikasi adanya upaya dalam meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah terutama dalam meningkatkan proses kegiatan pembelajaran kearah yang berkualitas. Terkait dalam konteks dua forum musyawarah ini dulunya sudah ada akan tetapi hanya jalan ditempat. Berdasarkan hasil pemetaan peneliti terkait sekolah yang berbasis Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kota tenggarong sebagaimana yang tersebar di 18 Kecamatan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, maka jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebanyak 47 Madrasah yang terdiri dari 2 Madrasah Negeri dan 45 Madrasah swasta. Namun tidak semua Madrasah yang tergabung di dalam MGMP dan MKKS di Kota Tenggarong. Sedangkan madrasah yang sudah bergabung di dalam MGMP di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sudah memiliki 2 program yang meliputi program rutin dan program pengembangan. Sedangkan kelompok kepala sekolah yang tergabung di dalam MKKS juga sudah memiliki 2 program yang meliputi program jangka pendek dan jangka panjang. Terkait dengan dua forum perkumpulan ini tentunya harus dapat bersinergi dan saling terkait serta terikat menjadi satu keutuhan sehingga diperlukan adalah suatu komitmen yang ikhlas dan tulus antara guru dan kepala sekolah untuk mencapai satu tujuan bersama dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar dapat menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam hal ini tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah berjudul “Pengaruh Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Guru”.

B. Landasan Teori

1. Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Forum kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Bertujuan untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan potensi guru sebagaimana berfungsi agar dapat membantu

dan menunjang keprofesionalan guru dalam rangka melaksanakan tugas pokok serta fungsi, wewenangnya sebagai guru. Terkait Standar Program MGMP sebagai berikut:

- a. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri atas: diskusi permasalahan pembelajaran, penyusunan silabus, program semester dan rencana program pembelajaran, analisis kurikulum, penyusunan instrumen penilaian evaluasi pembelajaran, pembahasan materi dan pementapan menghadapi Ujian Nasional.
 - b. Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan berikut: penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian) dan diskusi panel. Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang), penerbitan jurnal MGMP, penyusunan *website* MGMP, forum MGMP provinsi, kompetisi kinerja guru, *peer coaching* (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT), *lesson study* (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran), *professional learning community* (komunitas belajar yang profesional), TIPD (*Teachers International Professional Development*) kerja sama MGMP internasional, *global gateway* (kemitraan lintas negara).⁵
2. Program Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

Forum kegiatan profesional kepala sekolah pada tingkat SMP/MTs di wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan potensi guru sebagaimana berfungsi agar dapat membantu dan menunjang keprofesionalan guru dalam melaksanakan tugasnya

Terkait dengan Program Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sebagaimana indikator dalam menunjang kinerja guru sebagai berikut.

- a. Pertemuan ilmiah guru

Pertemuan ilmiah guru meliputi:

- 1) Diskusi panel adalah satu bentuk diskusi yang dipentaskan dihadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Diskusi panel digunakan untuk menyelesaikan suatu problema yang mana para panelisnya terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan.
- 2) Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (pakar) dalam bidang yang dibahas. Seminar membahas suatu masalah yang disampaikan oleh pemateri dan suatu naskah diberikan pada para partisipan untuk menyanggah masalah yang sedang dibahas oleh pemateri.
- 3) Konferensi merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau badan resmi sehubungan dengan masalah tertentu. Jika konferensi hanya bertujuan menyampaikan hasil keputusan suatu

⁵ Direktorat Profesi Pendidik, *Standar Pengembangan...*, h. 14

organisasi atau badan pemerintah mengenai suatu masalah, maka hal tersebut dinamakan dengar pendapat atau jumpa pers. Guru dalam konferensi membahas suatu masalah krusial yang dihadapi sekolah untuk mencapai kesepakatan menyelesaikan masalah tersebut dengan berlandaskan pada musyawarah mufakat.

- 4) Simposium adalah teknik pembahasan suatu masalah untuk meninjau pokok bahasan yang ditulis oleh beberapa ahli dan dikumpulkan serta diterbitkan sebagai buku yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Melalui kegiatan simposium, guru dapat mengetahui kumpulan konsep-konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu sekolah.
- 5) Diskusi merupakan proses bertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk diselesaikan secara bersama. Dengan adanya diskusi dapat mengembangkan keterampilan guru dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dengan jalan bertukar pikiran diantara guru. Diskusi adalah perundingan untuk bertukar pikiran mengenai suatu.
- 6) Lokakarya adalah sebuah pertemuan antar ahli dengan maksud untuk membahas masalah dalam bidang keahliannya untuk menyelesaikan masalah tertentu dan mencari solusinya. Seminar kolegial merupakan pertemuan ilmiah guru dalam satu sekolah secara periodik, membahas tema-tema tertentu sesuai dengan bidang keahlian guru dan membahas isu-isu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sebaiknya seminar kolegial dijadwal, siapa yang akan menyampaikan makalahnya dalam seminar kolegial.

b. Lomba kreativitas guru

Melalui keikutsertaan guru dalam ajang perlombaan tentunya akan mendapatkan pengalaman baru dan warna baru dalam dunia pendidikan. Lomba kreativitas guru ini agar guru memiliki kemampuan dalam bidang akademis dan profesional terus meningkat sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Selain itu lomba kreativitas guru juga bertujuan untuk menggali potensi dan kompetensi guru dalam pengembangan pendekatan, strategi, media dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal.

c. Guru berprestasi

Hal yang perlu diingat dalam pemilihan guru berprestasi adalah bahwa guru yang terpilih jangan sampai hanya pandai presentasi. Ada banyak komponen seseorang dapat menyandang guru berprestasi, seperti kemampuan akademik, jumlah siswa berprestasi yang dibimbingnya, sikap guru, produk-produk yang dihasilkan (perangkat pembelajaran yang disusun, hasil penelitian, buku, modul, diktat, jurnal ilmiah, tulisan populer yang dimuat dalam media massa) dan pengalaman mengikuti lomba, seminar dan lokakarya.

d. Pelatihan

Guru perlu didukung dalam menyelesaikan tugasnya, maka sekolah dapat mengirimkan beberapa guru pada kegiatan pelatihan atau sekolah itu sendiri dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut. Misalnya sekolah dapat menyelenggarakan sendiri pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis *blended learning*, pelatihan pembelajaran online, pelatihan tulisan profesional (penelitian, jurnal atau tulisan populer di media massa) dan pelatihan penerapan pembelajaran modern (disertai demonstrasi mengajar untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru). Sekolah dapat mengundang beberapa narasumber dari perguruan tinggi atau lembaga lain dalam pelatihan tersebut. Setelah guru mengikuti kegiatan pelatihan, guru diharapkan dapat selalu untuk memperbaharui kemampuannya dalam menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Seminar motivasi

Jika memungkinkan sebaiknya guru dikirim untuk dapat mengikuti seminar yang dapat meningkatkan motivasi guru seperti mengikuti seminar *Emotional Spiritual Quotient*, tujuannya untuk meningkatkan motivasi guru, terutama berkaitan dengan ketenangan hati dan jiwa guru sebagai seorang pendidik. *Emotional Spiritual Quotient* bertujuan untuk membentuk karakter melalui penggabungan tiga potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

f. *Lesson study*

Guna menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, maka guru perlu membentuk sebuah teamwork yang beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang guru. Kelompok kerja ini berupaya menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. *Lesson study* merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara berkelanjutan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual *learning* untuk membangun komunitas belajar.

g. Hibah Penelitian

Kepala sekolah dapat merancang dan melaksanakan program hibah penelitian bagi para guru dalam lingkup di sekolahnya. Kepala sekolah sebelum menyelenggarakan hibah penelitian di sekolah, terlebih dahulu kepala sekolah menyiapkan buku pedoman hibah penelitian dan tim *reviewer*. Dalam konteks ini para guru dipersilahkan untuk mengajukan proposal penelitian (baik secara tim atau individu), diutamakan penelitian yang dilaksanakan di sekolah, seperti penelitian tindakan kelas. Proposal yang masuk akan diseleksi oleh tim *reviewer*. Hasil *reviewer* dijadikan landasan untuk menentukan mana proposal yang diajukan dapat didanai oleh sekolah.

h. Tulisan Profesional

Guru didorong untuk menulis tentang topik yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Tulisan guru dapat bersumber dari hasil penelitian yang dilaksanakan guru (diajukan untuk dipublikasikan ada jurnal ilmiah), kegiatan *lesson study* yang berbasis penelitian atau dari gagasan guru sendiri (misalnya mengkritisi tentang kebijakan pemerintah dengan menawarkan solusi). Tulisan tersebut dapat diajukan ke media massa ataupun penerbit untuk diterbitkan. Menulis sebenarnya kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari profesi seorang guru, seperti guru dituntut untuk menulis rencana pembelajaran. Sehingga menulis adalah kegiatan yang tidak asing bagi guru. Disiplin pribadi guru untuk menulis mendorong tumbuhnya profesionalitas guru di sekolah.

3. Kinerja Guru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Terkait dengan kinerja guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru di dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
 - 2) Pemahaman terhadap siswa.
 - 3) Pengembangan kurikulum atau silabus.
 - 4) Perancangan pembelajaran.
 - 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
 - 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
 - 7) Evaluasi hasil belajar.
 - 8) Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. Kompetensi kepribadian adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Kompetensi sosial adalah suatu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi meliputi:
 - 1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
 - 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - 3) Bergaul secara baik, dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali siswa.
 - 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan berlandaskan norma serta sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
 - 5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- d. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- 1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- 2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang akan diampu.⁶

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 7 Madrasah Tsanawiyah yang ada di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Tenggarong Kota. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/quesioner dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan uji validitas, uji normalitas dan uji asumsi klasik. Adapun teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pengujian hasil data di lapangan tentang pengaruh Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: uji validitas data, uji reliabilitas data dan uji asumsi klasik (uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi).

Data yang telah melewati hasil tahapan pengujian, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda. Adapun hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL I
UJI REGRESI LINIER BERGANDA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5539,708	2	2769,854	6,909	,049 ^b
	Residual	1571,720	4	392,930		
	Total	7111,429	6			

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru: Bagian Kesatu Kompetensi Guru, h. 6.

-
- a. Dependent Variable: Peningkatan Kinerja Guru
 - b. Predictors: (Constant), MKKKS, MGMP

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,909 dan nilai signifikansi sebesar 0,046. Karena nilai F hitung (6,909) lebih kecil dari nilai F Tabel (6,940) dan nilai signifikansi (0,046) lebih besar dari 0,000, maka hasil dari interpretasi tersebut menyatakan tidak ada pengaruh secara simultan antara Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya interpretasi tidak ada pengaruh secara simultan antara Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan MGMP dan MKKS di Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program yang telah direncanakan. Sedangkan di sisi lain dianggap kurangnya dukungan dari *stakeholder* di daerah tersebut, dalam hal ini yaitu pemerintah yang menaungi MGMP dan MKKS tersebut. Sehingga berdasarkan data di atas antara MGMP dan MKKS belum bersinergi dengan baik.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, tentang Standar Pengembangan, Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang memuat tentang MGMP sebagai berikut:

- a. Program rutin terdiri atas: diskusi permasalahan pembelajaran, dalam pertemuan MGMP sekiranya guru membahas berkenaan dengan kendala dan hambatan yang terjadi di dalam proses pembelajaran, hal ini dikatakan begitu penting dikarenakan muatan dari tiap materi pada rumpun pembelajaran PAI memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Maka tentunya perlu didiskusikan berkenaan dengan media dan strategi pembelajaran yang cocok terhadap materi yang akan disampaikannya atau disajikan dalam proses pembelajaran. Penyusunan silabus, pengembangan silabus tentunya perlu dikembangkan berkenaan dengan kemajuan zaman, salah satu dari pengembangan silabus adalah memuat tentang penguatan pendidikan karakter, hal ini diperlukan untuk membentengi siswa dalam dekadensi moral dari dampak teknologi yang semakin maju dan canggih.
- b. Program semester, berkenaan dengan perancangan program semester tentunya harus dirumuskan bersama yang disandarkan kepada kalender pendidikan di sekolah masing-masing, hal ini perlu dilakukan agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien sesuai yang telah dirumuskan. Rencana program pembelajaran, berkenaan dengan rencana pembelajaran

tentunya harus dikembangkan, dengan cara dirumuskan dan dirancang serta dibuat sebelum pembelajaran dilaksanakan yang disandarkan kepada strategi pembelajaran yang menggunakan PBL, PJBL atau *Discovery Learning* dalam rangka mendesain strategi tersebut agar dapat dilaksanakan di dalam pembelajaran. analisis kurikulum, berkenaan dengan analisis kurikulum berkaitan dengan hari efektif dan tidak efektif yang berkaitan dengan struktur kurikulum, yang mana jumlah jam pembelajaran dalam mata pelajaran agama Islam hanya diberikan alokasi 2 jam pembelajaran dalam seminggu. Hal ini perlu didiskusikan berkaitan dengan perancangan prota dan prosem serta RPP, agar tepat sasaran.

- c. Penyusunan instrumen penilaian harus terlebih dahulu dalam membuat kisi kisi-kisi penilaian, apakah berkaitan dengan tugas terstruktur, tes lisan atau uraian. Hal ini perlu dilakukan agar materi yang disampaikan berdasarkan kompetensi dasar dapat terpenuhi sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang telah dirumuskan. Pembahasan materi dan pematapan menghadapi Ujian Nasional. Berkenaan dengan hal ini tentunya perlu dilakukan agar materi-materi yang dikeluarkan tidak melenceng dari kompetensi dasar sebagaimana yang telah disampaikan kepada siswa.
- d. Penelitian berupa penulisan karya tulis ilmiah, berkenaan dalam hal ini perlu sekiranya para guru diberikan pelatihan bagaimana pembuatan PTK yang didasarkan kepada pedoman yang baku sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh negara. Hal ini bertujuan agar guru selalu rajin dalam membaca dan menulis.

Maka berkenaan dengan program rutin sebagaimana yang telah dianalisis di atas, berkaitan dengan indikator penelitian meliputi diskusi permasalahan pembelajaran, penyusunan silabus, program semester, rencana program pembelajaran, analisis kurikulum, pembahasan materi dan pematapan menghadapi Ujian Nasional, serta penulisan karya ilmiah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih intens, melalui diskusi atau musyawarah di lembaga pendidikannya masing-masing tanpa melalui forum MGMP serta tidak terlibatnya pengawas pendidikan dan kepala sekolah dilembaga tersebut secara aktif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal yang munculnya dari masing-masing guru itu sendiri, dan faktor internal yang berkaitan dengan anggaran pembiayaan, struktur organisasi dan hubungan dengan pemerintah daerah maupun pusat.

Berkenaan dalam konteks MKKS dapat disinyalir tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat disebabkan kurangnya pengawasan dan dukungan dari pemerintah, hal ini terutama berkaitan dengan institusi pendidikan agama Islam yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini sebagaimana berdasarkan pada lampiran iii, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, republik indonesia nomor 15 tahun 2018, tentang, pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang menyatakan

bahwa: “*tugas pengawas adalah menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah melalui MGMP dan MKKS dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah*”. Adapun program pembimbingan dan pelatihan profesional MGMP dan MKKS sebagai berikut.

- a. Konferensi merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau badan resmi sehubungan dengan masalah tertentu dalam hal ini MKKS. Tujuannya adalah untuk membahas suatu masalah krusial yang dihadapi sekolah, misalnya berkaitan dengan dekadensi moral, manajerial kepala sekolah dan fungsi kepala sekolah sebagai pengawas di sekolah. Dengan adanya diskusi dapat mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan.
- b. Seminar kolegial merupakan pertemuan ilmiah guru dalam satu sekolah secara periodik, membahas tema-tema tertentu sesuai dengan bidang keahlian guru dan membahas isu-isu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sebaiknya seminar kolegial dijadwal, siapa yang akan menyampaikan makalahnya dalam seminar kolegial.
- c. *Lesson study*. Guna menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, maka guru perlu membentuk sebuah teamwork yang beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang guru. Kelompok kerja ini berupaya menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. *Lesson study* merupakan model pembinaan profesi guru melalui pengkajian pembelajaran secara berkelanjutan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar.
- d. Hibah Penelitian. Kepala sekolah dapat merancang dan melaksanakan program hibah penelitian bagi para guru dalam lingkup di sekolahnya. Kepala sekolah sebelum menyelenggarakan hibah penelitian di sekolah, terlebih dahulu kepala sekolah menyiapkan buku pedoman hibah penelitian dan tim reviewer. Dalam konteks ini para guru dipersilahkan untuk mengajukan proposal penelitian (baik secara tim atau individu), diutamakan penelitian yang dilaksanakan di sekolah, seperti penelitian tindakan kelas. Proposal yang masuk akan diseleksi oleh tim *reviewer*. Hasil *reviewer* dijadikan landasan untuk menentukan mana proposal yang diajukan dapat didanai oleh sekolah.

Berkenaan dalam konteks MKKS dapat disinyalir bahwa kegiatan kepala sekolah sebagai supervisor dan manajerial di sekolah dalam pelaksanaannya disinyalir tidak dapat berjalan semestinya hal ini dapat disebabkan kurangnya pengawasan dan dukungan dari pemerintah, yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagaimana yang telah dianalisis di atas, berkaitan dengan indikator penelitian meliputi Konferensi, Diskusi Seminar kolegial, lesson study, hibah penelitian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terlaksana. Di sisi lain ketidakaktifan pengawas pendidikan dalam

memberikan pengawasan di lembaga tersebut secara aktif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal yang munculnya dari masing-masing kepala sekolah itu sendiri, dan faktor internal yang berkaitan dengan minimnya gagasan, kurangnya anggaran pembiayaan, tidak adanya struktur organisasi dan kurang baiknya hubungan dengan pemerintah daerah maupun pusat.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terjadinya ketiadaan pengaruh tersebut dikarenakan MGMP dan MKKS di Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program yang telah direncanakan. Sedangkan di sisi lain dianggap kurangnya dukungan dari *stakeholder* di daerah tersebut, dalam hal ini yaitu pemerintah yang menaungi MGMP dan MKKS tersebut. Sehingga berdasarkan data di atas antara MGMP dan MKKS belum bersinergi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Profesi Pendidik, *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008).
- Jannah, Fathul, *Manajemen Akademik: Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009).
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Santoso, Agus dan Andi Achmad, *Desain Revisi Penilaian Kurikulum 2013 Tahun 2017: Studi pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Syamil: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6 No. 1).
- Santoso, Agus dan Muhammad Nasir, *Pengaruh Discovery dan ekspository Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri Kota Samarinda*, (Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4 No. 2).